**BAB V**

**Kesimpulan dan Saran**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai kehidupan Anak Jalanan khusus nya yang dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Surabaya, (UPTD) Liponsos, dan Unit Pelayanan Teknisi Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri Surabaya.

* + 1. Standar dan Sasaran Kebijakan/ ukuran dan Tujuan KebijakanDilihat dari implementasi kebijakan mengenai PMKS di Kota Surabaya bahwa dalam hal ini sesuai dengan wawancara dengan pihak terkait. Dinas Sosial sebagai *Implementors* (pelaksana) mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).
    2. Sumber daya implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber Keberhasilan memanfaatkan daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa:

”Sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.”

* + 1. Karakteristis dan organisasi pelaksana pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal  ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan displin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasive.
    2. Disposisi atau sikap para pelaksana Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006): “sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pendangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat melalui persepsi dari pelaksana (implementors) dalam batas mana kebijakan pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (befiltered) lebih dahulu itu dilaksanakan.

1. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan komplek. Prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten. Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya. Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974). Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan komplek

Maka dapat di simpulkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan terhadap masalah kesejahteraan sosial khususnya anak jalanan di Kantor Dinas Sosial, UPTD Liponsos, UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya sudah mendekati kata berhasil Semoga kedepannya pelayanannya lebih baik dari sebelum-belumnya.

* 1. **Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas yang di lakukan peneliti terhadap Implementasi pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial , maka peneliti merekomendasikan beberapa hal, sebagai berikut :

* + 1. Melayani lebih baik lagi terhadap Penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya anak jalanan yang ada di Kota Surabaya
    2. Dibuatkan peraturan untuk bisa berkomunikasi antar instansi-instansi yang sealur dengan lembaga sosial
    3. Dari instansi yang di tunjuk harus lebih tanggap untuk melayani semua PMKS yang ada di Kota Surabaya dengan baik dan sesuai standart prosedur
    4. Pemerintah pusat harus memberikan solusi terhadap UPT-UPT yang mendapatkan kesulitan menangani PMKS di Kota Surabaya
    5. Anak-anak jalanan yang harus di bina dan di bimbing yang lebih di perhatikan lebih biar tidak kembali jalanan kembali

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Ahmad Tanzeh. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis. Yogyakarta*

Bungin, Burhan. 2003*. Analisis Data Penelitian Kualitatif* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln (eds.). 2009. *Handbook of Qualitative Research. Terj. Dariyatno dkk*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

Departemen Sosial RI. 2005. *Bimbingan Sosial Bagi Penyandang Cacat Dalam Panti*. Jakarta

Iskandar, 2008*. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: Gaung Persada Press.

Mc.Millan dan Sally Schumacher. 2003*. Research in Education*. Versi terjemahan Sekolah Pascasarjana Program Doktor Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara

Mirnasari, Rina. (2013). *Inovasi Pelayanan Publik UPTD Terminal PurabayaBungurasih*. Jurnal Online Universitas Ailangga.

Moenir, H.A.S, 2002, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta

Midgley, J. 2000. Globalization, *Capitalism and Sosial Welfare: A Sosial Development Perspective*. Canadian Sosial Work, Special Issue: Sosial Work and Globalization, 2(1):13-28

Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications*. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

Rama, Dasaratha V. dan Frederick L. Jones 2009. *Sisitem Informasi Akuntansi*. Selema Empat. Jakarta

Suud, Mohammad. 2006. *Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Prestasi Pustaka

Suharto, Edi. 2006*. Membangaun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama. Bandung

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Soekanto, Soerjono. 2018. *Sosiologi Keluarga*. Rineka Cipta. Jakarta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV

Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta

Van Meter dan Van Horn Teori Implementasi ( *A Model of the Policy Implementation*)(1975)

Wahjudin, Sumpeno (2011).Perencanaan Desa Terpadu.Banda Aceh, Reinforcement Action and Development.

**JURNAL**

Karnaji. 1999. *Anak Jalanan dan Upaya Penanganan di Kota Surabaya.*

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Semarang. 2008. *Study Karakteristik Anak Jalanan dalam Upaya Penyusunan Program Penanggulanganya*

Muhammad Hilman Ginanjar. 2010.*Anak Jalanan Menurut PerfektifHukum*(*studi kasus anak jalanan di pertigaan UIN sunan kalijaga yogyakarta*).*.*

Sari. (2015). “Studi Deskriptif tentang Efektifitas Pemberdayaan dalam meningkatkan kemandirian Anak jalan di Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Kampung Anak Negri Dinas Sosial Kota Surabaya”

Setianingrum dan Erna dari fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.2005.*Analisis Kebijakan Pemkot Surabaya Dalam Menangani Anak Jalanan*.

Tuti Hayati. 2009. *Aliensi Diri Pada Anak Jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta*

Tata Sudrajat. 1999. *Isu Prioritas dan Program Intervensi untuk Menangani Anak Jalanan*

**UNDANG-UNDANG**

Undang–Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang penyandang kesejahteraan sosial